PENGARUH SUMBER DAYA MANUSIA, PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH, PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMITMEN ORGANISASI TERHADAP KEANDALAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

(Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Labuhan Batu)

Oleh :
Fransiska
Pembimbing : Nur Azlina dan Susilatri

Faculty Of Economics, Riau University, Pekanbaru, Indonesia
Email : fransiska252626@gmail.com

The Effect of Human Resource, Local Financial Monitoring, Information Technology Utilization and Commitmen organization to Reliability of Financial Reporting
(Study on Work Unit Labuhan Batu Regency)

ABSTRACT

This study aims to examine the effect of human resource, Local Financial Monitoring, information technology utilization and commitmen organization to reliability of financial reporting Labuhan Batu regency government. The data in this study is the primary data obtained from questionnaires distributed directly to the respondents. Data collected from 67 respondents who are working at financial reporting staff in local work unit of Labuhan Batu regency government. The method of data analysis used to test the hypothesis is multiple regression analysis using the program SPSS 20 version. The results of this study is showed that human resource, Local Financial Monitoring, information technology utilization and commitmen organization influence in partial in the reliability of financial reporting in Labuhan Batu regency government. The magnitude of the effect caused by Adjusted R^2 by four variables is 62,8% of the dependent variable, while the remaining 37,2% is influenced by other independent variabel that are not observed in this study.

Keyword :human resource, financial monitoring, information technology, commitmen and reliability financial

PENDAHULUAN

Dengan meningkatnya tuntutan masyarakat dengan penyelenggaraaan pemerintah yang baik (good governance government), telah mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menerapkan akuntabilitas publik. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui

suatu media petanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (Mardiasmo, 2006).

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standart Akuntansi Pemerintahan menyebutkan bahwa kriteria dan unsur-unsur pembentuk kualitas informasi yang menjadikan informasi dalam laporan keuangan pemerintah mempunyai nilai atau manfaat yang disebutkan dalam Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan terdiri dari : (1) Releven (2) Andal (3) Dapat dibandingkan (4) Dapat dipahami.

Perkembangan laporan mkeuangan pemerintah di Indonesia adalah hal menarik untuk diteliti lebih lanjut. Karena pada kenyataannya, masih terdapat ketidaksesuaian yang berhasil ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dalam pelaksanaan audit laporan keuangan pemerintah. Hasil pemeriksaan BPK terhadap 456 LKPD Tahun 2013 menunjukkan terdapat 5.103 kasus kelemahan Sistem Pengendalian Intern dan menemukan kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan sebanyak 5.986 kasus yang merugikan Negara senilai Rp4.202.738,94 juta (www.bpk.go.id).

Di Kabupaten Labuhan Batu sendiri terdapat temuan kasus mengenai kelemahan sistem pengendalian internal, yaitu yaitu (1) Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah pada beberapa bendahara penerimaan SKPD belum sesuai dengan ketentuan pengelolaan yang berlaku, (2) Nilai asset peralatan dan mesin tidak dapat ditelusuri keberadaannya sebesar Rp65.309.761.659, (3) Pengelolaan kas umum Daerah Kabupaten Labuhan Batu anggaran 2013 belum tertib, (4) Pengelolaan keuangan pada Dinas Pendidikan sebesar Rp2.053.797.913 tidak dapat diyakini kewajarannya, (5) Realisasi Alokasi Dana Desa dan bantuan untuk Partai Politik tidak didukung pertanggungjawaban yang memadai.

Dan terdapat kasus terhadap Ketidakpatuhan Peraturan Perundang-undangan, yaitu (1) Proses penganggaran SKPD tidak sesuai ketentuan dan terdapat kesalahan penganggaran, (2) Realisasi dana hibah dan bantuan sosial tidak sesuai peruntukan sebesar Rp848.050.000, (3) Terdapat perjalanan Dinas pada enam SKPD yang berindikasi tidak dilaksanakan sebesar Rp114.000.000 , (4) Penggunaan selisih dana klaim Jamkesmas sebesar Rp566.493898 pada RSU Rantauprapat yang tidak melalui mekanisme APBD (IHPS, 2014).

Banyak faktor yang mempengaruhi keandalan pelaporan keuangan pemerintah di Kabupaten Labuhan Batu, salah satu faktor yang mungkin mempengaruhi adalah sumber daya manusia. Sumber daya manusia adalah kemampuan sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan dan pengalaman yang cukup memadai. Dalam pengelolaan keuangan daerah yang baik, SKPD harus memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, yang didukung dengan latar belakang pendidikan akuntansi, sering mengikuti pendidikan dan pelatihan dan mempunyai pengalaman di bidang keuangan.

Faktor kedua yang juga mungkin mempengaruhi keandalan

pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah pengawasan keuangan daerah. Pengawasan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 51 tahun 2010 Tentang pedoman Pengawasan Penyelengaraan Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa pengawasan pemerintah daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengawasan keuangan daerah dapat membantu pemerintah dalam mengontrol kegiatan-kegiatan SKPD dalam menggunakan anggaran dan menyusun laporan keuangan. Pengawasan keuangan ini sangat penting apalagi dalam lingkup pemerintahan, agar tidak terjadi hal-hal atau kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh oknum pemerintahan itu sendiri. Apabila fungsi dari pengawasan ini dijalankan dengan baik oleh pemerintah maka sedikit sekali terjadi kemungkinan akan adanya kecurangan serta kesalahan-kesalahan.

Selain sumber daya manusia dan pengawasan keuangan daerah faktor yang mungkin berpengaruh terhadap keandalan pelaporan keuangan daerah adalah pemanfaatan teknologi informasi. Pemerintah daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi yang berguna meningkatkan kemampuan dalam mengelola keuangan daerah sesuai dalam Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.

Hal terakhir yang mungkin memiliki pengaruh terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah komitmen organisasi. Komitmen organisasi adalah suatu tingkat keyakinan sejauh mana seorang karyawan memihak pada suatu organisasi tertentu yang tujuannya berniat memelihara keanggotaan dalam organisasi itu. Jadi keterlibatan kerja yang tinggi berarti pemihakan seorang pada pekerjaannya yang khusus, dan komitmen organisasi yang tinggi berarti pemihakan pada organisasi yang mempekerjakannya. Dengan demikian adanya komitmen organisasi akan mempertahankan kepatuhan dalam penyajian laporan keuangan pemerintah yang reliabel sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti ingin menguji kembali faktor-faktor yang mempengaruhi Keandalan laporan Keuangan Daerah. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Kadek Hengki Primayana (2014). Perbedaaan penelitian ini dengan sebelumnya terletak pada objek penelitian dan Variabel, objek penelitian yaitu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Labuhan Batu berbeda dengan Kadek Hengki Primayana Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Buleleng, sedangkan peneliti menambah variabel komitmen organisasi dalam penelitian ini.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Apakah sumber daya manusia berpengaruh terhadap keandalan laporan keuangan pemerintah daerah? (2) Apakah pengawasan keuangan daerah berpengaruh terhadap keandalan laporan keuangan

pemerintah daerah? (3) Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap keandalan laporan keuangan pemerintah daerah? (4) Apakah komitmen organisasi berpengaruh terhadap keandalan laporan keuangan pemerintah daerah?

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah (1) Untuk menguji pengaruh kualitas sumber daya manusia terhadap keandalan laporan keuangan pemerintah daerah (2) Untuk menguji pengaruh pengawasan keuangan daerah terhadap keandalan laporan keuangan pemerintah daerah (3) Untuk menguji pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap keandalan laporan keuangan pemerintah daerah (4) Untuk menguji pengaruh komitmen organisasi terhadap keandalan laporan keuangan pemerintah daerah.

TELAAH PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan PP No 71 Tahun 2010 keterandalan pelaporan keuangan merupakan informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik Penyajian Jujur, Dapat Diverifikasi dan Netralitas.

Sumber Daya Manusia

Manusia adalah unsur terpenting dalam keberhasilan suatu organisasi, asset organisasi yang paling penting dan harus diperhatikan oleh manajemen adalah manusia (sumber daya manusia atau *human resource*). Hal ini bermuara pada kenyataan bahwa manusia merupakan elemen yang selalu ada dalam setiap organisasi, yang membuat tujuan-tujuan, inovasi dan mencapai tujuan organisasi.

Sumber daya manusia yang dimaksud disini secara khusus adalah aparat-aparat pemerintah. Aparat pemerintah memiliki posisi yang sangat penting dalam suatu organisasi pemerintahan daerah. Oleh sebab itu pengembangan sumber daya manusia (dalam hal ini aparatur pemerintah), dimaksudkan untuk membantu para pegawai dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas kerja serta profesionalisme. Dalam menyusun laporan keuangan pemerintah daerah yang baik, SKPD harus memiliki sumber daya manusia yang berkualitas agar laporan keuangan yang disusun baik dan andal. Sumber daya manusia dalam menyusun laporan keuangan pemerintah daerah haruslah berkompeten dan independen serta mampu bertanggungjawab atas laporan yang telah disusunnya.

Pengawasan Keuangan Daerah

Pengawasan merupakan usaha yang sistematis untuk menetapkan standar kinerja, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar kinerja yang sudah ditetapkan, untuk mengetahui penyimpangan yang terjadi dan untuk memperbaiki serta menjamin sumber daya pemerintahan

digunakan secara efektif dan seefisien mungkin untuk mencapai tujuan dari organisasi dalam hal ini pemerintah daerah. Pengawasan keuangan yang dilakukan juga diarahkan untuk mendapatkan keyakinan yang memadai terhadap efektifitas dan efisiensi organisasi, keterandalan pelaporan keuangan dan kepatuhan terhadap peraturan (Yosa, 2010).

Pengawasan keuangan negara dan daerah merupakan bagian integral dari pengelolaan keuangan negara dan daerah. Berdasarkan pengertiannya pengawasan keuangan negara dan daerah pada dasarnya mencakup segala tindakan untuk menjamin agar pengelolaan keuangan negara dan daerah berjalan sesuai dengan rencana, ketentuan dan undang-undang yang berlaku.

Pemanfaatan teknologi informasi

Pemanfaatan teknologi informasi adalah penggunaan komputer, software/perangkat lunak, dan lainya yang sejenis secara optimal (Wilkinson *et al*, 2005). Teknologi informasi yang salah satu contohnya komputer dapat membantu mempercepat pekerjaan yang sedang dikerjakan, dengan menggunakan komputer akan lebih akurat dan konsisten dalam perhitungan daripada menggunakan sistem manual.

Teknologi informasi meliputi komputer (*mainframe, mini, micro*), perangkat lunak (*software*), database, jaringan (*internet, intranet*), *electronic commerce*, dan jenis lainnya yang berhubungan dengan teknologi (Wilkinson *et al.* 2005). Teknologi informasi selain sebagai teknologi komputer (*hardware* dan *software*) untuk pemrosesan dan penyimpanan informasi, juga berfungsi sebagai teknologi komunikasi untuk penyebaran informasi. Komputer sebagai salah satu komponen dari teknologi informasi merupakan alat yang bisa melipatgandakan kemampuan yang dimiliki manusia dan komputer juga bisa mengerjakan sesuatu yang manusia mungkin tidak mampu melakukannya.

Komitmen Organisasi

Komitmen organisasi adalah ikatan keterkaitan individu dengan organisasi, sehingga individu tersebut "merasa memiliki" organisasinya. Komitmen menunjukkan keyakinan dan dukungan yang kuat terhadap nilai dan sasaran yang ingin dicapai oleh organisasi. Komitmen organisasi yang tinggi diperlukan dalam sebuah organisasi, karena terciptanya komitmen yang tinggi akan mempengaruhi situasi kerja yang professional. Komitmen organisasi bisa tumbuh disebabkan karena individu memiliki ikatan emosional terhadap organisasi yang meliputi dukungan moral dan menerima nilai yang ada serta tekad dari dalam diri individu untuk berbuat sesuatu agar dapat menunjang keberhasilan organisasi sesuai dengan tujuan dan lebih mengutamakan kepentingan organisasi dibandingkan dirinya sendiri.

Komitmen yang tinggi menjadikan individu peduli dengan nasib organisasi dan berusaha menjadikan organisasi kearah yang lebih baik, sehingga dengan adanya komitmen yang tinggi kemungkinan penurunan kinerja dapat dihindari. Sebaliknya, individu dengan komitmen rendah akan

mementingkan dirinya atau kelompoknya, dimana individu tersebut tidak memiliki keinginan untuk menjadikan organisasi kearah yang lebih baik, sehingga memungkinkan terjadinya penurunan kinerja.

Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah jawaban sementera dari masalah atau pertanyaan penelitian yang memerlukan pengujian secara empiris. Adapun yang menjadi hipotesis penelitian ini adalah :

H1 : Sumber daya manusia berpengaruh terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

H2 :Pengawasan Keuangan Daerah berpengaruh terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah

H3 : Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh terhadap keandalan laporan keuangan pemerintah daerah.

H4 : Komitmen Organisasi berpengaruh terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

METODE PENELITIAN

Lokasi yang menjadi objek penelitian ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Labuhan Batu. Penelitian ini dilakukan mulai bulan April 2015.

Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai yang bekerja pada SKPD Labuhan Batu. Pensampelan atas responden dilakukan secara purposive. Purposive sampling digunakan karena informasi yang akan diambil berasal dari sumber yang sengaja dipilih berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan peneliti (Sekaran,2006). Reponden dalam penelitian ini adalah para pegawai yang melaksanakan fungsi akuntansi/tata usaha keuangan pada SKPD Kabupaten Labuhan Batu yang berjumlah 28 SKPD. Dari setiap SKPD akan diambil 3 reponden dengan kriteria Kasubag keuangan, bendahara dan staff keuangan. Sehingga sampel dalam penelitian ini berjumlah 84 responden.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Pengumpulan data primer dilakukan melalui survei kuesioner diberikan kepada responden yang bekerja pada bagian akuntansi/penatausahaan keuangan pada SKPD di Kabupaten Labuhan Batu. Sedangkan data sekundernya adalah data yang diperoleh untuk melengkapi data primer yang didapatkan untuk mendukung dan menjelaskan masalah.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yang adalah (1) Penelitian Lapangan, yaitu pengumpulan data primer dengan cara memberikan surat yang berisikan pertanyaan kepada instansi terkait melalui peninjauan secara langsung. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner yang diberikan kepada responden yaitu pegawai yang bekerja pada SKPD Labuhan Batu dibagian keuangan/tata usaha dengan kriteria Kasubag keuangan, bendahara dan staff keuangan (2) Penelitian Kepustakaan, data-data ini diperoleh dari buku-buku, jurnal-jurnal, pencarian diinternet dan instansi terkait serta referensi lainnya yang berkaitan dengan objek yang diteliti.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji validitas and reliabilitas. Setelah dilakukan validitas and reliabilitas, barulah diadakan pengujian asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, uji heterokedastisitas dan analisis regresi berganda.

Defenisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Keandalan

Konstruk Nilai informasi Keandalan dapat diukur dengan indikator Kewajaran, Kelengkapan Unsur Laporan Keuangan,Generalisasi dan Dapat diuji.

Sumber Daya Manusia

Indikator konstruk Sumber Daya Manusia diukur dengan (1) Kapasitas Staff, (2) Tupoksi, (3) Pengembangan.

Pengawasan Keuangan Daerah

pengawasan keuangan negara dan daerah pada dasarnya mencakup segala tindakan untuk menjamin agar pengelolaan keuangan negara dan daerah berjalan sesuai dengan rencana, ketentuan dan undang-undang yang berlaku. Pengukuran variabel ini menggunakan instrumen kuesioner, dengan model skala likert lima poin.

Pemanfaatan Teknologi Informasi

Indikator pada teknologi informasi dapat diukur dengan (a) pengolahan data keuangan (b) perangkat (c) perawatan.

Komitmen Organisasi

Indikator pada komitmen organisasi dapat diukur dengan Rasa memiliki, Ikatan emosional, Arti sebuah organisasi, Keterikatan, Empati, Kejenuhan, Semangat komitmen, Loyalitas, Tanggug jawab, Profesionalisme dan Rasa bersalah.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Objek Penelitian

Dalam penelitian ini objek yang digunakan adalah pegawai yang bekerja pada SKPD Kabupaten Labuhan Batu dengan kriteria kasubag keuangan, bendahara dan staff yang bekerja dibagian keuangan. Keseluruhan kuesioner yang disebar adalah sebanyak 84 kuesioner. Kuesioner yang kembali sebanyak 73 kuesioner (86,90%), kuesioner yang bisa diolah sebanyak 67 kuesioner (79,76%), dan sebanyak 6 kuesioner (7,14%) tidak bisa diolah karena jawabannya tidak lengkap.

Hasil Statistik Deskriptif

Hasil uji statistik deskriptif menunjukkan angka mean dan standar deviasi yang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1 Statistik deskriptif

	N	Mean	Std.Deviation
SDM	67	36.4328	4.51672
PKD	67	27.2239	4.02575
Pemanfaatan TI	67	30.2090	4.30129
Komitmen Organisasi	67	42.0000	6.00252
Keandalan Pelaporan Keuangan Daerah	67	27.8507	3.22985
Valid	67		

Sumber : Data Olahan (2015)

Dari tabel 1 untuk variabel Sumber Daya Manusia dapat dilihat

bahwa nilai rata-rata 36,4328 dengan standar deviasi sebesar 4,51672. Untuk variabel Pengawasan Keuangan Daerah nilai rata-rata 27,2239 dengan standar deviasi 4,02575. Variabel Pemanfaatan Teknologi informasi memiliki nilai rata-rata 30,2090 dengan standar deviasi sebesar 4,30129. Variabel Komitmen Organisasi memiliki nilai rata-rata 42.0000 dengan standar deviasi 6.00252. Dan untuk variabel Keandalan Pelaporan Keuangan memiliki nilai rata-rata 27,8507 dengan standar deviasi sebesar 3,22985.

Hasil Uji Kualitas Data

Hasil Uji Validitas Data

Dalam penelitian ini uji validitas data dilakukan dengan analisis Korelasi Person melalui aplikasi SPSS Uji validitas dilakukan dengan melihat r_{tabel}. Nilai r_{tabel} dicari pada signifikansi 0,05 dengan uji 2 sisi dan jumlah data (n) = 67, maka didapat r tabel sebesar 0,240 Nilai r_{tabel} yang diperoleh dibandingkan dengan nilai r_{hitung} untuk menguji validitas dari data yang diperoleh dengan menggunakan kuesioner. Hasil uji validitas untuk instrumen Sumber Daya Manusia (SDM), Pengawasan Keuangan Daerah, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengawasan Keuangan daerah dalam penelitian ini menunjukkan bahwa semua pertanyaan dinyatakan valid, karena $r_{hitung} > r_{tabel}$.

Hasil Uji Reliabilitas Data

Pengujian reliabilitas ini menggunakan koefisien *Cronbach Alpha* dengan taksiran batasan minimal 0,6. Variabel ini akan dikatakan valid jika *Cronbach Alpha*-nya memiliki nilai lebih besar dari 0,6.

Tabel 2 Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	*Koefisien alpha*
Sumber Daya Manusia	0,644
Pengawasan Keuangan Daerah	0,890
Pemanfaatan Teknologi Informasi	0,871
Komitmen Organisasi	0,776
Keandalan Pelaporan Keuangan	0,836

Berdasarkan dari hasil uji reliabilitas diatas, semua variabel yang dijadikan instrumen dalam penelitian ini adalah reliabel atau handal karena menunjukkan tingkat reliabilitas yang tinggi hal ini dibuktikan nilai *koefisien alpha* lebih besar dari 0,60.

Hasil Uji Normalitas Data

Untuk melihat normalitas rata-rata jawaban responden yang menjadi data penelitian ini dapat dilihat dari gambar *normal probability plot* berikut:

Gambar 1 Normal Probability Plot

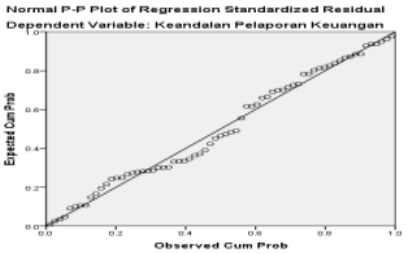

Hasil uji normal P-P plot untuk variabel keandalan pelaporan keuangan terlihat titik-titik menyebar disekitar garis diagonal, serta penyebarannya mendekati garis diagonal. Maka model regresi ini memenuhi asumsi normalitas.

Hasil Uji Asumsi Klasik

Hasil Uji Multikolinearitas

Pedoman suatu model regresi yang bebas multikolinearitas adalah nilai besaran *Variance Inflation Factor* (VIF) < 10 dan *Tolerance* > 0,1. Hasil pengujian multikolinearitas dalam penelitian ini

dapat di lihat pada Tabel dibawah ini :

Tabel 3 Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Tolerance	*VIF*
Sumber Daya Manusia	0,872	1,147
Pengawasan Keuangan Daerah	0,492	2,034
Pemanfaatan Teknologi Informasi	0,499	2,005
Komitmen Organisasi	0,856	1,168

Sumber : Data Olahan (2015)

Berdasarkan tabel diatas, model regresi yang diajukan untuk variabel independen semuanya terbebas dari multikolinearitas ini terlihat dari hasil pengolahan data yang menunjukkan variabel independen memiliki nilai toleransi berada diatas 0,1 dan nilai VIF dibawah 10.

Hasil Uji Autokorelasi

Untuk mendeteksi autokorelasi dapat dilakukan dengan melihat angka Durbin Watson. Autokorelasi tidak terjadi apabila angka Durbin Watson berada antara -2 sampai dengan +2. Hasil pengujian autokorelasi dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4 Pengujian Autokorelasi

Durbin Watson	N	Keterangan
1,783	67	Bebas Autokorelasi

Berdasarkan hasil diatas diketahui nilai d_{hitung} (Durbin Watson) terletak antara -2 dan +2 = -2 < 1,783 < +2. Dapat disimpulkan bahwa tidak ditemukannya autokorelasi dalam model regresi.

Hasil Uji Heterokedastisitas

Cara memprediksi ada atau tidak heterokedastisitas pada suatu model dapat dilihat pada pola gambar *Scatterplot* model tersebut. Jika gambar tidak membentuk pola atau acak, maka regresi tidak mengalami gangguan heterokedastisitas.

Gambar 2 Uji Heterokedastisitas

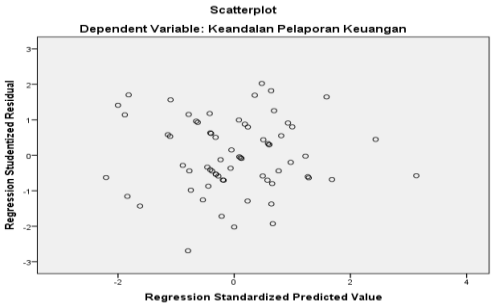

Dari gambar terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak, tidak membentuk suatu pola tertentu yang jelas. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini bebas dari heterokedastisitas.

Hasil Analisis Regresi Berganda

Dalam penelitian ini, data yang didapat akan diolah dengan model regresi linier berganda. Metode regresi dapat digunakan untuk memperlihatkan bagaimana variabel independen mempengaruhi variabel dependen.

Tabel 5
Hasil Analisis Regresi
Coefficients[a]

Model	Unstandardized Coefficient		Standardized Coefficient	t	Sig.
	B	Std Error	Beta		
(Constant)	1.187	2.649		.447	.656
Sumber Daya Manusia	.124	.058	.174	2.159	.035
Pengawasan Keuangan Daerah	.257	.086	.320	2.985	.004
Pemanfaatan Teknologi Informasi	.239	0.80	.319	2.995	.004
Komitmen Organisasi	.189	.044	.351	4.324	.000

a. Dependen Variabel: Keandalan Pelaporan Keuangan
Sumber : Data Olahan (2015)

Dari tabel diatas dapat diperoleh persamaaan regresi sebagai berikut :

$Y = 1{,}184 + 0{,}124X_1 + 0{,}257X_2 + 0{,}239X_3 + 0{,}189X_4$

Koefisien Determinasi (R^2)

Analisis koefisien determinasi dilakukan untuk melihat seberapa besar presentase pengaruh variabel Sumber Daya Manusia, Pengawasan Keuangan Daerah, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komitmen Organisasi terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah.

Tabel 6
Koefisien Determinasi (R^2)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.806[a]	.650	.628	1.97084

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan bahwa nilai Adjusted R *square* yang diperoleh sebesar 0,628 yang menunjukkan bahwa Keandalan Pelaporan Keuangan yang ada pada Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu dipengaruhi oleh variabel Sumber Daya Manusia, Pengawasan Keuangan Daerah, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komitmen Organisasi sebesar 62,8% dan sisanya 37,2% di pengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Hasil Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Untuk dapat mengetahui apakah ada pengaruh yang signifikan dari variabel masing-masing independen, maka dibandingkan antara nilai t_{hitung} dengan t_{tabel} serta membandingkan nilai signifikan t dengan *level of significant* (α). Nilai dari *level of significant* yang digunakan dalam penelitian ini adalah 5%. Apabila sig t lebih besar dari 0,05 maka H_0 diterima. Demikian pula sebaliknya jika sig t lebih kecil dari 0,05, maka H_0 ditolak. Bila H_0 ditolak ini berati ada hubungan yang signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Berdasarkan data dari Tabel 4.12 diketahui nilai t_{tabel} pada taraf signifikansi 5% dengan persamaan sebagai berikut:

t_{tabel} = n – k – 1: alpha/ 2
= 67 – 4 – 1: 0,05/ 2
= 62 : 0,025= 1,999

ket: n : jumlah
k :jumlah variabel bebas
1 :konstan

Berikut adalah hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan Uji statistik t untuk masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen :

Hasil Pengujian Hipotesis Pertama (X1)

Hipotesis pertama yang diajukan adalah

Ho : Sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Ha : Sumber daya manusia berpengaruh terhadap terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan Dari Tabel 5 di atas dapat dilihat bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu 2,159 > 1,999 dan sig.t (0,035) < 0,05 dengan demikian H_0 ditolak dan H_1 diterima yang berarti sumber daya manusia berpengaruh terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa sumber daya manusia berpengaruh terhadap keandalan pada pelaporan keuangan Pemda Labuhan Batu.

Berdasarkan teori yang mengatakan kurangnya jumlah pegawai akuntansi serta latar belakang pendidikan akuntansi pada subbagian akuntansi/tata usaha

keuangan pada satuan kerja pemerintah daerah Kabupaten Labuhan Batu yang dapat mempengaruhi keandalan pada pelaporan keuangan adalah benar. Karena dengan jumlah yang cukup serta memiliki latar pendidikan akuntansi, maka pegawai yang bekerja pada bagian keuangan akan dapat menerapkan pengelolaan keuangan daerah dengan baik.

Hasil Pengujian Hipotesis Kedua (X_2)

Hipotesis kedua yang diajukan adalah

Ho : Pengawasan Keuangan Daerah tidak berpengaruh terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Ha : Pengawasan Keuangan Daerah berpengaruh terhadap terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan Dari Tabel 5 di atas dapat dilihat bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu 2,958 > 1,999 dan sig.t (0,004) < 0,05 dengan demikian H_0 ditolak dan H_1 diterima yang berarti Pengawasan Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan.

Salah satu fungsi pengawasan adalah pengambilan tindakan korektif, yaitu apabila ditemukan adanya penyimpangan, kekeliruan serta pemborosan dapat segera diperbaiki, sehingga informasi keuangan yang dihasilkan menjadi valid dan relevan. Pengawasan merupakan upaya untuk mengenali penyimpangan atau hambatan dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Bila ternyata kemudian ditemukan adanya penyimpangan atau hambatan, diharapkan akan dapat segera dideteksi atau diambil tindakan koreksi, sehingga informasi keuangan dapat segera digunakan oleh pemakai dan pengelolaan keuangan pemerintah daerah dapat berjalan secara maksimal. Di dalam prosedur pengawasan, mencakup pula mengenai batas waktu penyampaian laporan keuangan pemerintah daerah, sehingga dengan adanya pengawasan yang baik, maka laporan keuangan pemerintah daerah dapat disampaikan dengan andal.

Hasil Pengujian Hipotesis Ketiga (X_3)

Hipotesis ketiga yang diajukan adalah

Ho: Pemanfaatan Teknologi Informasi tidak berpengaruh terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Ha: Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh terhadap terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan Dari Tabel 5 di atas dapat dilihat bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu 2,995 > 1,999 dan sig.t (0,004) < 0,05 dengan demikian H_0 ditolak dan H_1 diterima yang berarti Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Hasil pengujian diatas memberikan kesimpulan yaitu agar dapat terlaksananya pengelolaan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, harus didukung oleh teknologi yang memadai. Karena, teknologi informasi tersebut baik secara *hardware* maupun *software*, akan dapat mempengaruhi keandalan

pelaporan keuangan. Hasil penelitian ini didukung juga oleh penelitian yang dilakukan oleh Indriasari dan Nahartayo (2008), Andriani (2010), Winidyaningrum dan Rahmawati (2010), dan Faristina Rosalin (2011) yang mengatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi mempengaruhi keterandalan pelaporan keuangan.

Hasil Pengujian Hipotesis Keempat (X_4)

Hipotesis keempat yang diajukan adalah

Ho: Komitmen Organisasi tidak berpengaruh terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Ha: Komitmen Organisasi berpengaruh terhadap terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan Dari Tabel 5 di atas dapat dilihat bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu 4,324 > 1,999 dan sig.t 0,000< 0,05 dengan demikian H_0 ditolak dan H_1 diterima yang berarti Komitmen Organisasi berpengaruh terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Teori kepatuhan memberikan penjelasan mengenai pengaruh perilaku kepatuhan di dalam proses sosialisasi. Individu cenderung mematuhi hukum yang mereka anggap sesuai dan konsisten dengan norma-norma internal mereka, yaitu Komitmen normatif melalui moralitas personal (*normative commitment throughmorality*) berarti mematuhi hukum karena hukum tersebut dianggap sebagai keharusan dan komitmen normativ melalui legitimasi (*normative commitment through legitimacy*) berarti mematuhi peraturan karena otoritas penyusun hukum tersebut memiliki hak untuk mendikte perilaku. Dengan demikian adanya komitmen organisasi akan mempertahankan kepatuhan dalam penyajian laporan keuangan pemerintah yang reliabel sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Penelitian ini sejalan oleh penelitian yang dilakukan Aritonang dan Syarif (2009).

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

1. Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan. Kondisi sub bagian akuntansi/tatausaha keuangan yang sudah mendukung dan juga diimbangi dengan mengikutsertakan pegawai dalam pelatihan-pelatihan yang berhubungan dengan akuntansi akan membantu menyelesaikan tugas dan menghasilkan pelaporan keuangan yang andal.
2. Pengawasan Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan. Semakin baik pengawasan keuangan daerah maka akan meningkatkan kualitas informasi yang dihasilkan dalam pelaporan keuangan yang menjadi lebih andal.
3. Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan. Pemanfaatan Teknologi Informasi yang meliputi teknologi komputer dan teknologi komunikasi dalam pengelolaan keuangan daerah akan meningkatkan pemprosesan transaksi dan data lainnya, keakurasian dalam perhitungan serta penyiapan laporan output

lainnya tepat waktu. Hal tersebut akan membantu pemerintah dalam menangani peningkatan volume transaksi dari tahun ke tahun yang semakin kompleks.

4. Komitmen Organisasi berpengaruh terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan. Dengan adanya komitmen organisasi akan mempertahankan kepatuhan dalam penyajian laporan keuangan sehingga dapat meningkatkan kualitas keandalan laporan keuangan.
5. Berdasarkan nilai koefisien determinasi sebesar 0,628 hal ini menunjukkan bahwa 62,8% Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah dipengaruhi oleh sumber daya manusia, pengawasan keuangan daerah, pemanfaatan teknologi informasi dan komitmen organisasi. Sedangkan untuk sisanya sebesar 37,2% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Saran

Saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk peneliti selanjutnya antara lain :

1. Penelitian berikutnya dapat memperluas objek penelitian, misalnya mengambil sampel pada SKPD yang ada di beberapa Kabupaten bahkan se-Provinsi.
2. Peneliti selanjutnya dapat mendampingi responden secara langsung pada saat pengisian kuesioner.
3. Peneliti selanjutnya dapat menambahkan variabel independen lain yang memungkinkan dalam mempengaruhi Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Andriani, Wiwik. 2010. "Pengaruh SDM dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap keandalan dan ketepatwaktuan pelaporan keuangan daerah". *Jurnal akuntansi & Manajemen*. Vol. 05 No. 01. Juni 2010.

Arfianti, Dita. 2011. "Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah". *Skripsi.* Universitas Diponegoro.

Alimbudiono, Ria Sandra & Fidelis Arastyo Andono. 2005. "Kesiapan Sumber Daya Manusia Sub Bagian Akuntansi Pemerintah Daerah "XYZ" Dan Kaitannya Dengan Pertanggungjawaban Keuangan Dearah Kepada Masyarakat: Renungan Bagi Akuntan Pendidik". *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik.* Vol.05 No. 02. Maret 2004.

Aritonang, syarif. 2009. "Faktor-faktor Pendukung Keberhasilan Penerapan Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2005". *Skripsi*. Universitas Sumatera Utara.

Desmiyawati, 2014. "Faktor-faktor yang mempengaruhi keandalan dan ketepatan waktu pelaporan keuangan*"*. *Jurnal akuntansi*. Vol. 02 No. 02. April 2014.

Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 21*. Semarang : Badan penerbit Universitas Diponegoro.

Griffin, Ricky W. 2006. *Manajemen. Jilid 2, edisi tujuh*, Jakarta : Erlangga.

Hamzah, 2010. *Teknologi Komunikasi dan Informasi Pembelajaran*. Jakarta : Bumi Aksara.

Hengki, Kadek. 2014. "Pengaruh Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng*"*. *Jurnal akuntansi*. Vol. 02 No. 01. Januari 2014.

Indriasari, Desi dan Nahartayo Ertambang. 2008. "Pengaruh kapasitas SDM, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Intern Akuntansi terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah*".* *Simposium Nasional Akuntansi XI*. Pontianak.

Ikhsan, Arfan dan Muhammad Ishak, 2008. *Akuntansi Keperilakuan*. Jakarta: Salemba Empat.

Mardiasmo. 2006. "Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance"**.** *Jurnal Akuntansi Pemerintah*, Vol. 02 No. 01.

Mardiasmo. 2005. *Akuntansi Sektor Publik, Edisi II*. Yogyakarta . Penerbit Andi.

Rosalin, Faristina. 2011. "Faktor-faktor yang mempengaruhi keandalan dan timeliness pelaporan keuangan badan layanan umum*"*. *Jurnal Akuntansi.* Vol. 05 No. 01. Maret 2011.

Robbin dan Judge. 2007. *Perilaku Organisasi*, *Buku 1 & 2*. Jakarta : Salemba Empat

Silvia, Gita Marda. 2013. "Pengaruh Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Kota Dumai*"*. *Jurnal Akuntansi*. Vol. 2 No. 2.

Sekaran, Uma. 2006. *Metode Penelitian Untuk Bisnis Edisi 4*, Jakarta : Salemba Empat.

Sugandi, Joe. 2013. "Pengaruh Kapasitas SDM, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pengendalian Intern Akuntansi, dan Komitmen Organisasi Terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuansing*"*. *Jurnal Akuntansi*. Vol. 2 No. 2. Januari 2013.

Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung : Alfabeta

Tuasikal, A. 2007. "Pengaruh Pemahaman Sistem Akuntansi, Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Satuan Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah". *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik*, Vol. 08 No. 01. Februari 2007.

Wahyono, Teguh. 2009. *Membuat Sendiri Program Akuntansi*. Jakarta : PT. Elex Media Komputindo.

Widyaningrum dan Rahmawati. 2010. "Pengaruh Sumber Daya Manusia terhadap Keterandalan dan Ketepatwaktuan Pelaporan Keuangan*"*. *SNA XIII*. Purwokerto.

Wilkinson, W. Joseph, Michael J. Cerullo, Vasant Raval, dan Bernard wong on wing 2005, *Accounting Informasi System : Essential concept and Application.* Fourth Edition. John Wiley and Sons. Inc.

Yosa. 2010. *Pengertian pengawasan,* (*www.itjen-depdagri.go.id*, Diakses pada tanggal 11 September 2014)

Zetra, 2009. "Pengaruh Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah*"*. *Skripsi*.Universitas Gadjah Mada.

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2014. *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester 1 Tahun 2013.* Jakarta: BPK RI.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

_____Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standart Akuntansi Pemerintahan

_____Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor No. 51 Tahun 2010 Tentang pedoman Pengawasan Penyelengaraan Pemerintah Daerah

_____Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

_____Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah

_____Undang-Undang Nomor 71 Tahun 2010 tentang standart akuntansi pemerintahan.

_____Undang-Undang No. 74 tahun 2001 Tentang Tata Cara Pengawasan Penyelengaraan Pemerintah Daerah.